

Penyusunan Prosedur Operasional Standar dan Pedoman Kebijakan Akuntansi pada Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah

Nadia Syayyidah¹, Adam Zakaria², Dwi Handarini³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 20, 2026 Revised Agustus 4, 2026 Accepted Agustus 4, 2026 Kata Kunci: Prosedur Operasional Standar, Pengelolaan Keuangan, Pedoman Kebijakan Akuntansi Keywords: <i>Standard Operating Procedures, for Financial Management, Accounting Policy Guidelines</i>	Hasil pra-riset pada Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan, namun belum didukung oleh Prosedur Operasional Standar (POS) dan Pedoman Kebijakan Akuntansi yang terdokumentasi sehingga pelaksanaan prosedur dan pencatatan keuangan masih bergantung pada pemahaman masing-masing pengelola. Proyek ini bertujuan merancang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Kebijakan Akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan yayasan. Metode pelaksanaan proyek menggunakan model pengembangan ADDIE yang dibatasi hingga tahap <i>Development</i>, meliputi analisis kebutuhan, perancangan produk, pengembangan produk, serta validasi oleh ahli untuk menilai kelayakan produk yang dikembangkan. Hasil validasi menunjukkan bahwa seluruh produk berada pada kategori layak dan sangat layak untuk digunakan. Produk yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yayasan yang lebih sistematis, konsisten, dan akuntabel, serta menjadi referensi bagi yayasan pendidikan lain dalam mengembangkan perangkat tata kelola keuangan sesuai dengan karakteristik organisasinya. ABSTRACT <i>Preliminary research on the Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah indicates that financial management is already in place, but it is not yet supported by documented Standard Operating Procedures (SOPs) and Accounting Policy Guidelines, so the implementation of procedures and financial record-keeping still depends on the individual understanding of each manager. This project aims to design Standard Operating Procedures (SOPs) for Financial Management and Accounting Policy Guidelines tailored to the foundation's needs. The project implementation method uses the ADDIE development model, limited to the Development stage, which includes needs analysis, product design, product development, and validation by experts to assess the feasibility of the developed products. The validation results indicate that all products fall into the "acceptable" and "highly acceptable" categories for use. The developed products are expected to serve as guidelines for achieving more systematic, consistent, and accountable financial management within the foundation, as well as to serve as a reference for other educational foundations in developing financial management frameworks tailored to their organizational characteristics.</i>

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Corresponding Author:

Nadia Syayyidah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia
Email: syayyidahnadia@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Organisasi nonlaba dibentuk dengan tujuan utama memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung kesejahteraan sosial [1]. Tujuan utama pengelolaan sumber daya pada organisasi nonlaba adalah mendukung pelayanan kepada masyarakat, bukan menghasilkan keuntungan sebagaimana yang menjadi orientasi perusahaan komersial [2].

Perkembangan akuntansi di Indonesia tidak hanya ditujukan bagi entitas berorientasi laba, tetapi juga mencakup organisasi nonlaba, termasuk yayasan yang berperan dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan [3]. Namun demikian, pengelolaan keuangan pada banyak yayasan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi menyebabkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan belum berjalan secara optimal. Temuan [4] menunjukkan bahwa staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di Yayasan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi maupun manajemen. Kondisi tersebut menyebabkan proses adaptasi terhadap tugas pengelolaan keuangan berlangsung lebih lama, sehingga laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku bagi organisasi nonlaba.

Lemahnya tata kelola keuangan juga tercermin dari berbagai kasus penyimpangan dana pada yayasan pendidikan di Indonesia. Kasus manipulasi transaksi keuangan pada sebuah yayasan pendidikan di Pekanbaru [5], dugaan penggelapan dana sekolah di Kabupaten Bekasi [6], serta polemik pertanggungjawaban dana hibah pada Yayasan Melati Samarinda menunjukkan bahwa belum adanya prosedur operasional yang jelas, pemisahan tugas, serta pedoman pencatatan keuangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan prosedur operasional dalam pengelolaan keuangan yayasan. Khairunnisa et al. [8] menyusun pembaruan SOP penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan model ADDIE sehingga menghasilkan alur kerja yang lebih sistematis melalui flowchart. Sementara itu, Kumanireng dan Utomo [9] menyusun SOP permohonan serta pertanggungjawaban uang muka untuk meningkatkan keteraturan proses kerja dan pengawasan internal. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aktivitas keuangan tertentu sehingga belum menghasilkan prosedur operasional yang mengatur keseluruhan proses pengelolaan keuangan yayasan serta belum didukung dengan pedoman kebijakan akuntansi sebagai acuan pencatatan transaksi.

Hasil pra-riset pada Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan pada setiap jenjang pendidikan telah berjalan, tetapi belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) yang terdokumentasi dan berlaku secara seragam. Selain itu, praktik pencatatan keuangan masih bergantung pada pemahaman masing-masing pengelola tata usaha yang sebagian besar tidak memiliki latar belakang akuntansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan prosedur, pencatatan transaksi, dan pelaksanaan pengendalian internal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan keuangan yang didukung dengan pedoman kebijakan akuntansi sesuai kebutuhan Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah. Produk yang dikembangkan diharapkan menjadi acuan tertulis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan keseragaman prosedur, memperkuat pengendalian internal, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yayasan.

2. METODE

Proyek ini dilaksanakan di Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah yaitu merupakan salah satu Yayasan Pendidikan Islam yang berada di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model pengembangan ADDIE terbatas yang meliputi tahap *analysis*, *design*, dan *development*. Pedoman Kebijakan Akuntansi yang disusun pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sidabutar et al., (2025) [10] yang dilaksanakan pada Taman Kanak-Kanak Cahaya Mutiara.

Model ADDIE meliputi tahap *Analyze* untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan, *design* untuk merancang produk, serta *development* untuk mengembangkan rancangan menjadi produk yang siap digunakan [11], lalu rancangan produk tersebut divalidasi oleh ahli untuk memperoleh penilaian mengenai kelayakan produk [12]. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengelolaan keuangan yang berjalan. Selanjutnya dilakukan tahap *design* dengan menyusun rancangan awal Prosedur Operasional Standar (POS) dan Pedoman Kebijakan Akuntansi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Terakhir pada tahap *development*, rancangan produk dikembangkan dan divalidasi oleh ahli untuk menilai kelayakan produk. Ahli yang akan menilai produk pada penelitian terdiri dari satu orang Akademisi yaitu Dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dan dua orang pengurus Yayasan serta dua orang praktisi yaitu Bendahara pada madrasah. Data hasil validasi dianalisis menggunakan skala Likert dengan menghitung persentase tingkat kelayakan berdasarkan skor yang diperoleh [12].

Tabel 1 Keterangan Penilaian Skor Validasi Ahli

Skor	Keterangan
5	Sangat Layak
4	Layak
3	Cukup Layak
2	Tidak Layak
1	Sangat Tidak Layak

Untuk menghitung persentase penilaian dari ahli digunakan rumus sebagai berikut:

$$xi = \frac{\sum S}{S_{max}} \times 100\%$$

Keterangan

- xi : Nilai kelayakan angket
 $\sum S$: Jumlah skor
 S_{max} : Skor maksimal

Tabel 2. Skala Kelayakan Produk

Persentase	Kriteria
$X > 81\%$	Sangat Layak
$61\% < X \leq 80\%$	Layak
$41\% < X \leq 60\%$	Cukup Layak
$21\% < X \leq 40\%$	Tidak Layak
$X \leq 20\%$	Sangat Tidak Layak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan di yayasan dengan tahapan *Analyze*, *Design* and *Develop*. Produk yang dikembangkan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Kebijakan Akuntansi yang disusun berdasarkan kebutuhan yayasan. Setiap tahapan pengembangan menghasilkan temuan yang menjadi dasar penyusunan produk dan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1 Tahap *Analyze*

Tahap analisis dalam penelitian ini terdiri atas analisis awal dan analisis lanjutan. Analisis awal dilakukan melalui wawancara pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum kondisi pengelolaan keuangan yayasan. Hasil wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan maupun Pedoman Kebijakan Akuntansi yang terdokumentasi dan diberlakukan secara resmi. Pelaksanaan pengelolaan keuangan selama ini masih mengacu pada kebiasaan kerja masing-masing unit pendidikan sehingga prosedur yang diterapkan belum sepenuhnya seragam. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian tugas, mekanisme otorisasi, pengendalian internal, serta proses pencatatan keuangan belum memiliki acuan tertulis yang dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pengelola keuangan.

Selanjutnya dilakukan wawancara semi terstruktur dengan Bendahara Madrasah dan Pembina Yayasan untuk mengetahui alur transaksi yang terjadi pada Yayasan dan Madrasah, serta ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam proses pencatatan transaksi keuangan yang nantinya dibutuhkan untuk tahap *Design* dan *Develop*.

3.2 Tahap *Design*

Tahap design dilakukan dengan menyusun rancangan awal produk berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini ditentukan struktur, sistematika, dan isi dari Prosedur Operasional Standar (POS) maupun Pedoman Kebijakan Akuntansi. Berikut susunan struktur pada Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan.

Tabel 1. Struktur Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan

Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah	NAMA POS	
	Nomor POS	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	:
Tujuan	Dasar Hukum	
Ruang Lingkup	Peralatan dan Perlengkapan	
Pengguna	Waktu Pelaksanaan	
Definisi		

No	Aktivitas	Pelaksana			Standar Mutu		Keterangan
		Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	Waktu	Luaran	

Riwayat Perubahan Dokumen				
No.	Tanggal Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Halaman
Pengesahan				
		Nama	Jabatan	Paraf
Dibuat Oleh	:			
Diperiksa Oleh	:			

Sedangkan pada pedoman kebijakan akuntansi struktur dokumen terdiri dari beberapa sub bab. Penjelasan atas sub bab yang terdapat pada Pedoman Kebijakan Akuntansi tertera pada tabel 3 berikut

Tabel 3. Struktur Pedoman Kebijakan Akuntansi

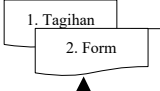
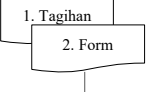
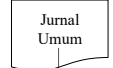
No	Struktur	Keterangan
1	Pemahaman Dasar	Memuat penjelasan mengenai tujuan penyusunan pedoman, referensi standar akuntansi yang digunakan, serta gambaran umum laporan keuangan yayasan berdasarkan ISAK 335 sebagai dasar penyusunan kebijakan akuntansi.
2	Bab I Penerimaan Kas	Memuat kebijakan akuntansi atas transaksi penerimaan kas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
3	Bab II Pengeluaran Kas	Memuat kebijakan akuntansi atas transaksi pengeluaran kas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
4	Bab III Piutang	Memuat kebijakan akuntansi atas transaksi piutang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
5	Bab IV Aset Tetap	Memuat kebijakan akuntansi atas transaksi aset tetap yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, metode depresiasi dan pengungkapan.
6	Bab V Liabilitas	Memuat kebijakan akuntansi atas transaksi liabilitas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
7	Bab VI Daftar Akun	Memuat usulan daftar akun (<i>chart of accounts</i>) yang digunakan sebagai acuan dalam proses pencatatan transaksi keuangan Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah. Daftar akun dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan aktivitas operasional yayasan.
8	Bab VII Ilustrasi Jurnal	Memuat contoh pencatatan jurnal atas transaksi yang umum terjadi di Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah sebagai panduan dalam menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten.
9	Bab VIII Format Pencatatan	Memuat usulan contoh format pencatatan akuntansi, seperti jurnal umum dan perhitungan depresiasi aset tetap, yang digunakan sebagai acuan dalam proses pencatatan transaksi keuangan.

3.3 Tahap *Develop*

Tahap *development* merupakan proses penyusunan produk secara lengkap berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Produk yang dikembangkan terdiri atas Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Kebijakan Akuntansi. POS yang dikembangkan disusun atas 4 kelompok POS dimulai dari perencanaan anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas dan pemeriksaan fisik & pengawasan. Berikut hasil pengembangan atas salah satu Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Waqfiah Perguruan Al-Khairiyah dapat dilihat pada gambar 2.

PEMBAYARAN BIAYA UTILITAS Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah		Nomor POS : XXX/POS/YWPAK/VI/20XX Tanggal Pembuatan : XX/XX/20XX Tanggal Efektif : Disahkan Oleh :
Tujuan		Dasar Hukum
1. Menjadi pedoman dalam proses pembayaran biaya utilitas untuk mendukung operasional yayasan dan madrasah. 2. Memastikan pembayaran biaya utilitas dilakukan sesuai tagihan yang sah dan dicatat secara lengkap serta akuntabel. 3. Mendukung kelancaran operasional melalui pembayaran utilitas secara tepat waktu.		Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Ruang Lingkup		Peralatan dan Perlengkapan
Pembayaran biaya utilitas yang timbul pada Yayasan Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah, termasuk listrik, air, telepon, internet, dan biaya layanan pendukung operasional lainnya.		1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Tagihan Utilitas (Jika Ada)
Pengguna		Tagihan Rutin
1. Bendahara 2. Kepala Madrasah		1. Pembayaran Listrik 2. Pembayaran Air 3. Pembayaran Telepon 4. Pembayaran Internet
Definisi		
Biaya Utilitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh yayasan untuk memperoleh dan menggunakan layanan penunjang operasional, seperti listrik, air, telepon, internet, dan layanan sejenis lainnya.		

Tabel 2. POS Pembayaran Biaya Utilitas

No.	Aktivitas	Pelaksana		Standar Mutu		Keterangan
		Bendahara	Kepala Madrasah	Waktu (Menit)	Luaran	
1	Bendahara mengecek tagihan atas utilitas Madrasah			10		
2	Bendahara menuliskan jumlah tagihan pada form Pengeluaran Kas dengan menuliskan Nomor Dokumen, Keterangan, jumlah, Harga dan Total. Serta menandatangani pada kolom tertera dilengkapi dengan tanggal pembubuhan tanda tangan			5	Form pengeluaran kas dan bukti tagihan	
3	Bendahara meminta persetujuan Kepala Madrasah atas pengeluaran kas tersebut, untuk selanjutnya ditanda tangani apabila telah disetujui			15	Form pengeluaran kas dan bukti tagihan	
4	Bendahara membayarkan biaya utilitas tersebut, dan menyimpan bukti pembayaran			20	Bukti pembayaran	
5	Bendahara mencatat pengeluaran kas tersebut pada Jurnal Umum			15	Jurnal umum	
6	Bendahara menyimpan dokumen pembayaran tersebut sebagai arsip			10		

Riwayat Perubahan Dokumen				
No.	Tanggal Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Halaman
Pengesahan				
		Nama	Jabatan	Paraf
Dibuat Oleh	:			
Diperiksa Oleh	:			

Selanjutnya, kedua produk divalidasi oleh para validator untuk menilai kelayakan isi, sistematika penyajian, dan bahasa. Validasi dilakukan oleh Dosen Akuntansi, Pengawas Yayasan, Pembina Yayasan dan dua orang Bendahara Madrasah.

Tabel 4. Total Skor Penilaian Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Keuangan

Validator	Skor tiap pertanyaan											Total Skor ($\sum S$)	Skor Max	Persentase Kelayakan (xi)	Ketegori Layak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	54	55	98,18%	Sangat Layak
2	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	52	55	94,55%	Sangat Layak
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100,00%	Sangat Layak
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80,00%	Layak
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80,00%	Layak

Tabel 5. Total Skor Penilaian Pedoman Kebijakan Akuntansi

Validator	Skor tiap pertanyaan											Total Skor ($\sum S$)	Skor Max	Persentase Kelayakan (xi)	Ketegori Layak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100,00%	Sangat Layak
2	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	51	55	92,73%	Sangat Layak
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100,00%	Layak
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80,00%	Layak
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80,00%	Layak

Berdasarkan hasil validasi ahli, Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Kebijakan Akuntansi yang telah disusun telah dinilai pada aspek kelayakan isi, sistematika penyajian, dan bahasa dengan tiga validator memberikan penilaian sangat layak, dan dua validator lainnya kategori layak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek pengembangan yang telah dilakukan, proyek ini telah menghasilkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan Yayasan yang dikembangkan mencakup prosedur utama dalam pengelolaan keuangan Yayasan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pembagian tanggung jawab. POS yang disusun memuat langkah kerja yang digambarkan dalam bentuk *flowchart*. Selain itu, Proyek ini juga menghasilkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Yayasan yang memuat kebijakan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan karakteristik Yayasan. Atas kedua produk tersebut dilakukan validasi ahli untuk menilai kelayakan POS dan Pedoman Kebijakan Akuntansi, yang mendapatkan penilaian sangat layak dari tiga validator dan dua validator memberikan penilaian layak. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat melakukan melakukan tahap *implementation* dan *evaluation* agar produk yang dirancang dapat lebih sempurna.

REFERENSI

- [1] A. Sopanah, K. Hasan, K. Putra, dan I. Rusdianti, *Akuntabilitas Publik Organisasi Nirlaba*, R. B. Sulistyan, Ed. Surabaya, Indonesia: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- [2] S. Biduri, *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*, M. P. S. B. Sartika, Ed. Sidoarjo, Indonesia: UMSIDA Press, 2018.
- [3] W. Ramadhani, T. D. Safiqha, Siltia, P. Andini, dan V. Martin, "Peran pelatihan akuntansi terhadap penerapan ISAK 35 pada yayasan keagamaan di Indonesia," *Jurnal ANC*, vol. 1, hal. 257–286, 2025.

- [4] M. Pea, A. Jaya, C. L, dan Rantererung, "Model pengendalian keuangan NGO yang efektif pada Yayasan Eran Sangbure Mayang," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, vol. 5, hal. 739–746, 2025.
- [5] CK2, "Diduga gelapkan dana yayasan ratusan juta, oknum kepala sekolah ditangkap polisi," *Cakaplah*, 14 Jul. 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125384/2025/07/14/diduga-gelapkan-dana-yayasan-ratusan-juta-oknum-kepala-sekolah-ditangkap-polisi>
- [6] W. Noviansyah, "Gelapkan dana sekolah Rp 651 juta, Kepsek-Bendahara SD di Bekasi ditangkap," *Detik News*, Mar. 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita/d-7833078/gelapkan-dana-sekolah-rp-651-juta-kepsek-bendahara-sd-di-bekasi-ditangkap>
- [7] H. Khairunnisa, D. K. Respati, dan U. N. Jakarta, "Pemutakhiran standar operasional prosedur (SOP) siklus penerimaan dan pengeluaran kas pada Yayasan Al-Qayyim," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, vol. 6, no. 3, hal. 514–527, 2025.
- [8] I. H. W. Kumanireng dan R. B. Utomo, "Sosialisasi pembuatan SOP permohonan uang muka dan pertanggung jawaban uang muka Yayasan SATUNAMA Yogyakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, vol. 3, no. 3, hal. 419–425, 2023.
- [9] J. D. Sidabutar, H. Khairunnisa, H. Nasution, dan U. N. Jakarta, "Rancangan pedoman akuntansi dan standar operasional prosedur (SOP) penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Cahaya Mutiara," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, vol. 6, no. 2, hal. 295–311, 2025.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.
- [11] Zamsiswaya, Syawaluddin, dan Syahrizul, "Pengembangan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 8, hal. 46363–46369, 2024.
- [12] A. Rustandi dan Rismayanti, "Penerapan model ADDIE dalam pengembangan media pembelajaran di SMPN 22 Kota Samarinda," *Jurnal Fasilkom*, vol. 11, no. 2, hal. 57–60, 2021.